

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan IPH bulan April sampai dengan bulan Juli 2026 Kabupaten Kepulauan Aru 1,38- 0,81. peningkatan nilai IPH tersebut menunjukkan adanya tekanan inflasi yang masih beradaptasi tingkat yang terkendali, namun perlu diwaspadai karena memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Kenaikan IPH terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas pangan strategis, yaitu Cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng yang menjadi komoditas penyumbang utama perubahan harga. disisi lain sebagian besar komoditas kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih relatif stabil sehingga mampu menahan laju kenaikan inflasi daerah.

Perkembangan harga barang penting lainnya maupun kelompok jasa selama periode pengamatan juga relatif stabil dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi di kabupaten kepulauan aru masih di dominasi oleh kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, kondisi cuaca, dan kelancaran distribusi antar pulau.

Resiko ke Depan

Beberapa resiko yang berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi daerah pada periode

berikutnya antara lain:

1. Terbatasnya pasokan cabai dan komoditas hortikultura akibat faktor cuaca maupun musin tanam.
2. Tingginya ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari luar daerah sehingga biaya transportasi dan distribusi dapat memengaruhi harga ditingkat konsumen
3. Meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan maupun kegiatan tertentu yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.
4. Fluktuasi harga minyak goreng dan komoditas pangan strategi lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi pasar internal.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan yang mempengaruhi upaya pengendalian inflasi daerah:

1. Masih terjadinya kenaikan harga pada komoditas pangan strategis. Berdasarkan hasil pemantauan komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga. kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura masih rentan mengalami fluktuasi harga.

2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah. Sebagian besar kebutuhan pangan strategis Kabupaten Kepulauan Aru masih dipasok dari luar daerah. ketergantungan tersebut menyebabkan harga komoditas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan barang di daerah pemasok, biaya transportasi, serta kelancaran distribusi melalui jalur laut.
3. Tingginya biaya distribusi dan hambatan transportasi. Sebagai daerah kepulauan, distribusi barang sangat tergantung pada transportasi laut dan kondisi cuaca. gangguan pelayanan atau keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan berkurangnya pasokan di pasar sehingga mendorong kenaikan harga.
4. Terbatasnya produksi lokal komoditas hortikultura. Produksi cabai dan sayuran di Kabupaten Kepulauan Aru belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan sehingga pasokan dari luar daerah masih menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan.
5. Belum optimalnya penguatan cadangan dan stabilitas pasokan pangan. Upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi antarinstansi, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjamin kelancaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, TPID melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin melalui pengumpulan data setiap minggu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Setda. hasil pemantauan menjadi dasar dalam mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.

Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemerintah daerah terus berkordinasi dengan distributor, pedagang dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan strategis terutama beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kecukupan stok pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada aspek kelancaran distribusi, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, Distributor serta Penyedia jasa transportasi dalam hal ini Jasa PT. Temas Shipping Dobo, UPP Kelas III Dobo, PT Peln Dobo, Ketua TKBM Pelabuhan Dobo, Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Kep.Aru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kep.Aru, dan Dinas Perhubungan Kab.Kep.Aru guna mengantisipasi hambatan distribusi, mengingat Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. pemantauan distribusi dilakukan untuk meminimalkan keterlambatan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.

Pada aspek komunikasi efektif. TPID melaksanakan koordinasi dan rapat evaluasi perkembangan harga secara berkala, menyampaikan informasi perkembangan harga kepada pimpinan daerah, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam merumuskan langkah langkah pengendalian inflasi.

pada bulan mei terjadi lonjakan harga, TIPD Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan

Operasi Pasar yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mengendalikan tekanan inflasi di daerah.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok. pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mampu membantu masyarakat memperoleh komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, TPID juga secara rutin melakukan pemantauan perkembangan harga melalui Indikator Perkembangan Harga (IPH), koordinasi lintas perangkat daerah serta komunikasi dengan distributor dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama TPID perlu terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K. upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan produksi pangan lokal, penguatan kerja sama antardaerah, optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah pada periode rawan inflasi, serta pemantauan Indikator Perkembangan Harga (IPH) secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkala melalui pengumpulan data Indikator Perkembangan Harga (IPH) dan Koordinasi lintas perangkat daerah sehingga potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih dini.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada periode yang berpotensi menimbulkan gejolak harga, seperti menjelang hari besar keagamaan nasional, serta memperluas cakupan lokasi pelaksanaannya hingga menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan yang mengalami tekanan harga.
3. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal, terutama komoditas hortikultura yang sering menjadi penyumbang inflasi, melalui dukungan kepada kelompok tani berupa penyediaan benih, sarana produksi pertanian, pendampingan teknis dan pengembangan kawasan tanam.
4. Meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok melalui koordinasi dengan pelaku usaha, distribusi, dan penyedia jasa transportasi agar pasokan tetap lancar, terutama pada saat kondisi cuaca kurang mendukung.
5. Memperkuat koordinasi TPID melalui rapat koordinasi rutin, evaluasi perkembangan harga, serta penyusunan langkah antisipatif berdasarkan hasil pemantauan IPH sehingga kebijakan yang diambil lebih cepat, tepat dan terukur.